

**BAB IV**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KETERBUKAAN  
INFORMASI PUBLIK DI KOTA SEMARANG, STUDI  
KASUS: MASYARAKAT PENGGUNA PUSAT  
INFORMASI PUBLIK (PIP)**

Dalam bagian ini peneliti akan menjelaskan mengenai persepsi masyarakat dalam menghadapi keterbukaan informasi publik di Kota Semarang. Bagaimana mereka mempersepsikan keterbukaan informasi publik yang telah dijalankan oleh Hendrar Prihadi sebagai walikota akan diuraikan sesuai data yang telah penulis dapatkan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sejak Maret 2017 hingga Juni 2017. Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mulai dilaksanakan oleh DPR RI pada 10 Mei 2010 dan mulai diberlakukan berbagai daerah di Indonesia. Undang-undang ini ditujukan untuk memberikan hak dan akses bagi masyarakat untuk mengetahui segala hal tentang penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas para pejabat publik dengan mewajibkan semua badan publik mengumumkan informasi yang diatur dalam UU KIP.

Persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik merupakan salah satu hal untuk mendeskripsikan seberapa mengetahui kah masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan pemerintahan. Dalam konsep persepsi telah dijelaskan bahwa persepsi dibentuk didasarkan aspek kognitif, aspek afektif dan aspek konatif. Ketiga aspek

tersebut dapat digunakan untuk mengetahui pengetahuan masyarakat Semarang terhadap keterbukaan informasi publik. Pemahaman mengenai adanya keterbukaan informasi publik sama sekali tidak dibatasi oleh jenis kelamin, usia, dan pekerjaan.

#### **4.1 Aspek Kognitif Pengetahuan Masyarakat mengenai Keterbukaan Informasi Publik**

Melalui aspek ini, peneliti ingin mengetahui pengetahuan masyarakat Kota Semarang terhadap adanya keterbukaan informasi publik melalui adanya gedung PIP. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang KIP pasal 1 bahwa Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara negara, dan/atau penyelenggara dan penyelenggara badan publik, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.<sup>44</sup>

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Walikota Hendi Prihadi untuk dekat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Diantaranya, dengan membangun Pusat Informasi Publik yang ditujukan sebagai ruang publik untuk mempermudah akses masyarakat Kota Semarang dalam mencari informasi. Masyarakat dapat mengunjungi PIP dengan gratis, nyaman dan tersedia wi-fi dengan koneksi internet yang cepat. Selain itu, PIP ini dapat dipergunakan untuk tempat anak muda berkumpul untuk rapat, mengerjakan tugas, nongkrong maupun

---

<sup>44</sup> UU KIP No 14 Tahun 2008

memanfaatkan fasilitas publik lainnya. Bahkan pada tahun 2016, Pusat Informasi Publik Kota Semarang meraih top 99 inovasi Pelayanan Publik se-Jateng.<sup>45</sup>

Keterbukaan informasi akan berhasil ketika masyarakat paham mengenai hak dan kewajiban mereka dalam berpartisipasi di penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hasil wawancara, hampir seluruh masyarakat berpendapat bahwa keterbukaan informasi merupakan hal yang harus terpenuhi. Transparansi ini tidak terlepas dari upaya dan sistem yang dibuat untuk memberikan informasi, akses dan jaminan hukum kepada masyarakat untuk mengetahui informasi publik. Menurut salah satu informan mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik itu sendiri adalah sebagai wujud good government yaitu menerapkan prinsip – prinsip setiap informasi harus bersifat terbuka dan dapat di akses.<sup>46</sup> Hal ini menandakan bahwa setiap informasi yang diberikan kepada publik harus berdasarkan fakta dan dapat dibuka atau diberikan kepada publik secara mudah. Selain itu diungkapkan juga oleh Arya “keterbukaan informasi publik.. ya keterbukaan pemerintah dalam hal misal nya dalam rencana program-program pemerintah kedepan nya, pokoknya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan ”.

Setiap masyarakat berhak untuk memperoleh informasi tanpa melihat latarbelakang sosial, politik, ekonomi, suku, gender dan agamanya. Fungsi masyarakat sebagai pengontrol pemerintah sebagaimana diatur pada UU No 14 tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik bahwa hak memperoleh

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Ibu wulan sebagai Koordinator PPID, di Kantor Humas Pemkot Semarang

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP yaitu Rais, Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, di Gedung PIP

informasi merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu ciri penting negara demokratis, serta sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dari hasil tersebut dapat dianalisis bahwa sebagian masyarakat yang datang ke PIP hanya memahami secara umum mengenai keterbukaan informasi publik; seperti hanya mengetahui bahwa keterbukaan itu penting dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Namun tidak mengetahui konteks keterbukaan informasi publik yang mengacu pada tujuan adanya UU KIP No 14 tahun 2008, yaitu keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah.

#### **4.1.1 Pengetahuan masyarakat mengenai Informasi Publik**

Dalam pasal 1 disebutkan bahwa pengertian dari informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan badan publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik, sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. Hal ini berarti informasi publik dapat digunakan oleh semua orang selain informasi yang dikecualikan. Pengetahuan dasar mengenai informasi publik merupakan hal yang penting karena melalui inilah masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam mendapatkan informasi publik.

Sebagian besar masyarakat pengguna PIP memahami informasi publik hanya sebatas informasi yang bersifat umum dan dapat diakses secara mudah dan

gratis.<sup>47</sup> Senada dengan yang diungkapkan oleh informan bahwa “informasi yang ada saat ini kita semua tahu, karena tidak ada yang ditutup-tutupin, dan biar informasi tuh bisa tersebar luas jadi masyarakat jadi tahu gitu mbak.”<sup>48</sup>. Berbeda halnya dengan Dani yang menjelaskan bahwa “...saya jawab sepemahaman saya ya mbak, jadi informasi publik itu ya segala sesuatu yang mengandung informasi penting (himbauan, peringatan, pengumuman pemberitahuan) yang boleh diumumkan atau disebarluaskan untuk kepentingan publik.” Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat pengguna PIP cukup mengetahui makna dari pengertian informasi publik yaitu informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Mereka menganggap bahwa semua informasi dapat diakses dan didapatkan secara mudah.

#### **4.1.2 Pengetahuan masyarakat mengenai Keterbukaan Informasi Publik**

Pada dasarnya transparansi ini merupakan dasar dari terciptanya akuntabilitas pemerintah yang mensyaratkan adanya keterbukaan informasi, adanya akses dan prosedur bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, dan jaminan hukum bagi terlaksanannya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Sampai saat ini pengetahuan masyarakat mengenai keterbukaan informasi belum merata. beberapa masyarakat mengatakan mereka tidak mengetahui adanya Undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Hal ini menandakan bahwa tingkat kepedulian mereka terhadap jalannya suatu pemerintahan kurang

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP yaitu Puti, Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017, di Gedung PIP

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP yaitu Hima, Pada Hari Senin tanggal 29 Mei 2017, di Gedung PIP

diminati. Esensi demokrasi yang mengatakan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat kurang dimaksimalkan.

Sebagian besar masyarakat pengguna PIP, beranggapan bahwa keterbukaan informasi perlu diselenggarakan dalam pemerintahan sebagai bentuk penyesuaian era globalisasi. Bagi mereka informasi itu penting untuk semua masyarakat. Keterbukaan informasi yang mereka maksud adalah mudahnya akses internet untuk mendapatkan berbagai informasi baik itu mengenai pemerintahan ataupun untuk pemenuhan informasi sesuai kebutuhan masyarakat. Seperti yang diutarakan oleh Arya<sup>49</sup> perlu karena kita tidak bisa terlepas dari informasi, biar sinkron antara keinginan masyarakat dan pemerintah.

Hal ini sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik, yang menyatakan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Oleh karena itu, masyarakat perlu untuk selalu *up date* informasi terbaru baik itu dari pemerintahan maupun informasi sesuai kebutuhannya. Untuk mempermudah akses dalam mendapatkan keterbukaan informasi publik, Pemkot Semarang menciptakan suatu inovasi dengan membangun pusat informasi publik. Hadirnya pusat informasi publik ini memang ditanggapi positif bagi kalangan remaja dikarenakan memenuhi kebutuhan masyarakat akan internet dan ruang publik. Sementara jika dilihat dari sisi Pusat

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, Pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017, di Gedung PIP

informasi publik menurut Gelar keterbukaan informasi publik itu yaitu<sup>50</sup> “awalnya saya enggak tahu sih PIP itu apa, terus waktu itu di ajak sama temen kesini buat bikin tugas, nah baru mulai tau kalau PIP sedikit banyak buat fasilitas publik. Kalau khususnya saya kurang tahu melayani apa aja, cuma karena sering kesini jadi mau enggak mau saya memperhatikan, oo ternyata disini bisa buat mencari informasi gitu.” Senada dengan yang diungkapkan oleh Asya<sup>51</sup> “kalau misalnya saya lihat dari sisi PIP nya sendiri itu ya kak, menurut saya itu tempat orang buat nyari informasi, apalagi disini kan wifi nya juga kenceng pasti membantu banget buat kita, ga cuman di akademik aja tapi juga tugas organisasi juga pastinya terbantu juga.”

Berdasarkan hasil pengamatan memang didalam pusat informasi publik ini ramai dikunjungi kalangan usia muda untuk kumpul organisasi, mengerjakan tugas atau hanya sekedar nongkrong. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan<sup>52</sup>, ia mengatakan bahwa saat ini keterbukaan di Semarang mungkin sudah cukup baik. Tapi menurutnya kurang merata aja, hal ini disebabkan karena pengguna media sosial itu kan kaum menengah keatas, kalau menengah kebawah kan belum mesti pakai, kalau saya liat gencarnya promosi kan melalui media sosial, jadi kalau masyarakat menengah kebawah tahu tentang PIP cuma lewat omongan orang saja, tuturnya. Oleh sebab itu, esensi dari keterbukaan informasi

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017, di Gedung PIP

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017, di Gedung PIP

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan pengguna PIP yaitu Arya, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017, di Gedung PIP

publik sesuai dengan undang-undang KIP kurang dipahami masyarakat pengguna pusat informasi publik.

#### **4.1.3 Pengetahuan Masyarakat mengenai kewajiban badan publik/pemerintah dalam menerapkan KIP**

Dalam undang-undang keterbukaan informasi publik pada bagian ke empat pasal 7, menjelaskan tentang kewajiban badan publik memberikan, menyediakan, atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu pengguna PIP, Asya menjelaskan bahwa pentingnya keterbukaan informasi publik diterapkan dalam pemerintahan, mengingat saat ini era globalisasi telah mempengaruhi masyarakat untuk tidak bisa terlepas dari internet dan dunia luar. Menurutnya jika tidak adanya keterbukaan informasi publik dan ruang publik yang tersedia untuk umum, pemerintah akan tertinggal oleh jaman. Pemanfaatan teknologi yang seperti penerapan keterbukaan informasi melalui media internet maupun Pusat informasi publik ini memang perlu dilakukan oleh pemerintah, karena selain cctv dengan keterbukaan informasi inilah bisa memantau kinerja pemerintah lewat internet untuk memudahkan seluruh masyarakat mengetahuinya.<sup>53</sup>

Senada dengan yang diutarakan oleh Dani menanggapi bahwa keterbukaan informasi itu wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menyatakan bahwa pemanfaatan kemajuan teknologi perlu dilakukan agar

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Jumat 26 Mei 2017, di Gedung PIP



masyarakat ikut berperan dalam kemajuan kota atau negara. Disisi lain penting untuk menghindari masalah korupsi untuk informasi berupa anggaran. Dengan adanya keterbukaan ini pemerintah dapat menyimpulkan apa yang diinginkan oleh masyarakat sehingga bisa melaksanakan tugas sesuai kebutuhan masyarakat.<sup>54</sup>

Dari hasil wawancara tersebut sebagian besar masyarakat merasa bahwa keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan itu penting dan dibutuhkan di era globalisasi. Menurut salah satu pengguna PIP yaitu yang mengatakan bahwa saat ini keterbukaan informasi publik adalah salah satu cara negara atau pemerintah untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat, agar pemerintah bersikap transparan dan sebagai fungsi masyarakat mengontrol pemerintahan.<sup>55</sup>

Selain itu, ada juga yang menyatakan bahwa sangat penting sekali pemerintah menerapkan keterbukaan informasi publik, mulai dari adanya tempat pusat informasi publik dan sebagainya. Jadi pemerintahan tidak hanya mempromosikan diri dibaliko, dijalan, karena mungkin itu populer tahun 90 an. Sedangkan sekarang karena era digital pemerintah juga harus bisa mengikutinya dengan cara yang kekinian, karena adanya keterbukaan pemerintah bisa lebih merangkul warganya.<sup>56</sup> Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat pengguna PIP telah memahami dan mengetahui akan pentingnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah.

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017, di Gedung PIP

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP yaitu Hagi, pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017, di Gedung PIP

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP yaitu Gelar, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017, di Gedung PIP

#### **4.1.4 Pengetahuan Masyarakat mengenai hak dan kewajiban pengguna informasi publik**

Pada bab III bagian ke satu dalam undang-undang keterbukaan informasi publik, dijelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan tujuan undang-undang keterbukaan informasi publik yang menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik.

Sebagian masyarakat menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya keterbukaan informasi publik hanya melalui media, baik itu media sosial maupun elektronik. Seperti yang diutarakan oleh Adli<sup>57</sup>, mengatakan bahwa ia mendapatkan pengetahuan mengenai keterbukaan dari berita dan sosial media. Sedangkan, dari beberapa masyarakat PIP hanya satu orang yang mengetahui adanya undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Alip mengatakan bahwa ia mengetahui keterbukaan informasi publik karena pernah melihat di internet tentang UU KIP tersebut. “Saya mengetahui keterbukaan informasi public dari UUD, internet dan teman saya.”<sup>58</sup> Ia juga menjelaskan bahawa sebagai seorang masyarakat modern saat ini sudah selayaknya kita ikut andil dalam pembangunan daerah kita, jadi menurut saya informasi yang perlu diketahui adalah rencana anggaran pemerintah, program kerja pemerintah, beserta realisasinya.

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017, di Gedung PIP

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017, di Gedung PIP

Senada dengan Hagi<sup>59</sup>, ia juga beranggapan bahwa informasi yang harus diketahui oleh masyarakat yaitu penggunaan uang rakyat. Berbeda dengan yang diutarakan oleh Asya, ia mengungkapkan bahwa informasi yang ingin dia dapatkan hanya seputar info mengenai kuliner yang berada di Kota Semarang. Sedangkan mengenai pemerintahan masih kurang dibutuhkan, tuturnya. Hal ini dikarenakan minat dan kebutuhan para pengguna PIP ini berebeda-beda maka memengaruhi persepsi masing-masing individu. Seperti halnya Asya yang memiliki latar belakang masih duduk di bangku sekolah menengah ke atas, dan seringnya ia mengunjungi pusat informasi publik ini hanya sebagai tempat untuk memanfaatkan internet cepat agar dapat menyelesaikan tugasnya.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menandakan bahwa masyarakat pengguna pusat informasi publik memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai hak dan kewajiban sebagai pengguna informasi publik. Meskipun hampir seluruh masyarakat kurang mengetahui kontkes KIP yang mengacu pada UU KIP, tetapi bagi mereka keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan ini merupakan hal yang penting untuk terus dilakukan. Selain itu masyarakat menganggap bahwa keterbukaan informasi penting diberikan kepada masyarakat luas agar tidak menimbulkan prasangka negatif dalam berjalannya pemerintahan. Sebagian masyarakat ini memperoleh informasi berasal dari media masaa maupun media elektronik. Hal ini memperlihatkan kalau masyarakat pengguna pusat informasi publik tidak terlalu aktif dalam proses pengawasan

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP , pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017, di Gedung PIP

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017, di Gedung PIP

pemerintahan namun hanya aktif dalam memanfaatkan fasilitas publik yang tersedia. Ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan yang kurang mengenai adanya undang-undang keterbukaan informasi publik, sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya fungsi kontrol terhadap pemerintah.

Saat ini, sosialisasi masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk mensejahterakan rakyatnya. Partisipasi merupakan salah satu kunci utama dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Partisipasi merupakan perhatian mendalam mengenai perbedaan atau perubahan yang akan dihasilkan dalam satu pembangunan sehubungan dengan kehidupan masyarakat.<sup>61</sup> Hal ini diperlukan untuk mengetahui seberapa aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berkaitan dengan sosialisasi tidak terlepas dari tingkat kesadaran masing-masing individu terhadap pemerintah. Hal ini akan berdampak pada partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Mas Amri, pemerintah Kota Semarang dapat dikatakan sudah open government tetapi belum transparan. Hal ini disebabkan karena secara format mungkin ada unsur kesengajaan untuk susah dipahami oleh masyarakat.<sup>62</sup>

Selain itu, kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengimplementasikan Perwal no 26 tahun 2012 tentang PPID adalah kurangnya pemahaman birokrasi akan keterbukaan informasi. Pengetahuan mengenai KIP dan PPID masih kurang maksimal. Seharusnya dalam melaksanakan implementasi kebijakan harus dapat

---

<sup>61</sup> Dwiyanto, Agus, ed. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University press hal 46

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Mas Amri selaku wakil ketua LSM Pattiro, pada 8 Maret 2017, di Kantor LSM Pattiro

diterima oleh semua personil agar dapat memberikan arahan yang jelas kepada implementor. Sehingga, kendala tersebut tidak membuat pelaksanaan KIP di Kota Semarang gagal untuk dilaksanakan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, seperti yang diungkapkan Ibu Wulan bahwa sosialisasi dilakukan dengan meminta SKPD untuk mengupload atau mengumumkan informasi yang harus disediakan dan di upload melalui website atau papan pengumuman, sehingga masyarakat dapat meminta secara langsung dan juga melalui CS (customer service) atau online. Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui rilis-rilis dan juga videotron.<sup>63</sup>

Namun, kurangnya sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik ini sangat dirasakan oleh masyarakat pengguna PIP. Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat pengguna PIP, menunjukkan bahwa, alat komunikasi yang digunakan dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi melalui media komunikasi visual. Seperti yang diungkapkan oleh Arya,<sup>64</sup> ia beranggapan bahwa kurang meratanya sosialisasi mengenai keberadaan PIP menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya keterbukaan informasi. Seperti hasil pengamatan di PIP bahwa kurangnya papan pengumuman atau papan petunjuk yang berisikan mengenai hak masyarakat dalam memperoleh informasi sesuai dengan UU KIP.

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Wulan sebagai koordinator PPID, pada tanggal 6 Maret 2017, di Kantor Humas Pemkot Semarang

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Jumat 26 Mei 2017, di Gedung PIP

Keterbukaan adalah bentuk komunikasi pemerintah terhadap masyarakat. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Suatu kebijakan akan berjalan efektif apabila dapat dipahami oleh masyarakat dan pemangku kebijakan dalam mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Komunikasi harus digencarkan secara proaktif untuk menghindari kesalahan informasi dan membuat para implementor tertarik serta memahami mengenai adanya KIP di Semarang. Kurangnya komunikasi kepada pelaksana kebijakan akan mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Tujuan dasar perlu dikomunikasikan dengan jelas dan akurat agar pelaksana kebijakan dapat mengetahui secara tepat mengenai kebijakan tersebut. Komunikasi harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan keadaan saat ini. Sumber informasi yang berbeda akan menghasilkan interpretasi yang berbeda.

#### **4.2 Aspek Afektif Pandangan/pemahaman Masyarakat mengenai KIP melalui adanya Pusat Informasi Publik**

Melalui aspek ini, peneliti ingin mengetahui pendapat masyarakat Kota Semarang terhadap manfaat dari adanya keterbukaan informasi publik melalui adanya pusat informasi publik. Aspek afektif ini adalah berupa perasaan untuk menolak atau menerima kebijakan yang dibuat. Pusat informasi publik ini ditujukan bagi masyarakat Kota Semarang yang masih kebingungan dalam mencari informasi publik tentang Kota Semarang. Oleh karena itu, pemenuhan hak tersebut harus diproses secara istimewa. Proses itu harus seefisien, seproduktif, tarif rendah, ketersediaan tempat yang memadai dan seterbuka

mungkin, sehingga dapat terjangkau oleh setiap orang. Dengan cara inilah setiap orang berkesempatan sama untuk dapat menggunakannya.<sup>65</sup>

Kebutuhan akan informasi memang merupakan kebutuhan yang tak terelakkan di dalam kehidupan masyarakat. Hampir semua informasi dinilai menarik dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun terkadang sebagian besar informasi terlewatkan begitu saja dikarenakan berbagai alasan yakni, tidak sempat memperhatikan, atau tidak ada waktu untuk itu, dan/atau ada informasi yang lebih menarik dari yang terlewatkan tadi. Akan tetapi, informasi-informasi tersebut kurang mendapatkan tempat di masyarakat. Kondisi seperti ini membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menempatkan isi informasi tersebut. Terdapat tiga fungsi pemerintahan menurut Rasyid (1999), bahwa pemerintah mengembangkan fungsi hakiki yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Praktik pemerintahan tidak dapat lepas dari pengaruh gejala sosial. Hal ini berawal dari adanya interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan dan tuntutan masyarakat, baik di bidang publik maupun pelayanan sipil.

#### **4.2.1 Pandangan Masyarakat mengenai usaha Pemkot Semarang dalam menciptakan KIP**

Inovasi yang dilakukan oleh Pemkot Semarang dalam menciptakan keterbukaan informasi publik adalah melalui pelayanan publik. Hadirnya PIP ini dianggap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Semarang akan adanya

---

<sup>65</sup> Amal, ichlasul dan Armaidi armawi. 1996. *Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. hal 26

ruang publik. Dengan adanya PIP masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas yang semuanya gratis dan mendapatkan berbagai informasi yang dicari. Informasi yang diminta berbagai macam dari umum ke khusus. Tidak hanya informasi saja tetapi adanya gedung PIP ini merupakan inovasi yang dilakukan oleh Walikota Semarang untuk menciptakan 3 in 1 pelayanan publik yaitu layanan permintaan data, layanan informasi publik, dan layanan pengaduan. Tujuan khususnya adalah mendekatkan masyarakat dengan pemerintah.<sup>66</sup>

Untuk memberikan stimulus kepada masyarakat, di dalam PIP juga disediakan hologram walikota Hendi Prihadi yang menjelaskan berbagai hal mengenai Kota Semarang, kemudian sebuah layar TV yang memperlihatkan gambaran Kota Semarang serta beberapa komputer dengan layout website Kota Semarang. Hal ini ditujukan untuk memberikan stimulus agar masyarakat yang datang ke PIP dapat memahami keterbukaan informasi yang telah disediakan pemerintah. Hal tersebut merupakan suatu hal yang baik karena dengan demikian masyarakat dapat memiliki ruang publik yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Seperti yang diungkapkan oleh Puti<sup>67</sup> “Dari semua usaha nya sih bagus, kalau dilihat dari gedung PIP ini jadi kita punya tempat untuk berdiskusi ,untuk mengerjakan tugas jadi ada tempat selain kampus.” Senada dengan Hima<sup>68</sup>, ia beranggapan bahwa adanya pusat informasi publik ini dapat menunjang terpenuhinya akses internet agar memudahkan masyarakat dalam mencari segala

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Isia selaku Kabbag PPID, pada hari Rabu 24 Mei 2017, di Gedung PIP

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Sabtu 27 Mei 2017, di Gedung PIP

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Senin 29 Mei 2017, di Gedung PIP



macam informasi. Sedangkan menurut Gelar<sup>69</sup> yaitu “dengan adanya pusat informasi publik ini Kota Semarang lambat laun mulai kelihatan perkembangannya, semakin maju dengan mulai menciptakan ruang publik. Dalam hal ini otomatis pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi mereka. Salah satu hal terpenting ya kembali lagi ke individu yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Itu semua kan tergantung individunya ya mbak, kalau memang dia butuh ya pasti dia akan memanfaatkannya dengan baik.”

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian informan dalam mendefinisikan PIP memiliki pandangan yang relatif sama. Mereka berpendapat bahwa PIP hanyalah ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas. Namun, keberadaan PIP ini kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Sesuai dengan teori persepsi yang menyatakan bahwa pemahaman mengenai suatu informasi yang diterima oleh individu satu dengan yang lainnya berbeda-beda tergantung pada faktor internal dan eksternal yang pernah dirasakan oleh masing-masing individu.

#### **4.2.2 Pandangan Masyarakat mengenai adanya Pusat Informasi Publik sebagai pemenuhan informasi publik**

Sebelum adanya UU No 14 tahun 2008, keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan kebutuhan bagi beberapa orang yang berkepentingan. Dalam ranah ini terjadi hubungan yang sangat insentif antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Hal tersebut akhirnya menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Saat ini mindset yang

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Sabtu 27 Mei 2017, di Gedung PIP

berkembang di masyarakat menempatkan pejabat publik sebagai penguasa bukan sebagai pelayan masyarakat. Keterbukaan informasi adalah tantangan dalam reformasi birokrasi. Jargon reformasi yaitu adanya transparansi dan tata kelola pemerintah yang baik, tidak akan bisa diubah tanpa mengubah budaya dan pola kerja badan publik. Keterbukaan informasi tidak akan berhasil di jalankan apabila hak dan kewajiban yang telah tercantum dengan sangat jelas tidak dimanfaatkan oleh masyarakat.

Saat ini untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK untuk mendukung pengembangan e-government melalui slogan : *BE SMART CITY (Based on E-government, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent CITY)*, Pemkot Semarang berinovasi dengan menghadirkan Pusat Informasi Publik. Hal ini merupakan bentuk perwujudan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Pemkot Semarang. Hadirnya pusat informasi publik (PIP) ini merupakan sarana bagi masyarakat Kota Semarang untuk memudahkan mereka dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Keunggulan utama yang diberikan PIP adalah memberikan 3 (tiga) pelayanan publik sekaligus dalam satu atap, yakni : layanan permohonan data dan informasi pelayanan publik, Pusat Pengelolaan Pengaduan (P3M), dan berbagai fasilitas pelayanan publik yang bisa dipakai oleh masyarakat secara gratis.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian informan mengungkapkan bahwa dengan hadirnya pusat informasi ini sangat membantu mereka dalam pemenuhan informasi dan ruang publik yang nyaman, gratis, dan memiliki akses internet yang

cepat. Hal ini dinyatakan oleh Dani<sup>70</sup>, yaitu “Keberadaan PIP Kota Semarang sangat membantu masyarakat Kota Semarang, terutama saya sebagai mahasiswa merasa terbantu dengan fasilitas-fasilitas terbaik yang diberikan secara gratis.”

Senada yang diungkapkan oleh Puti, ia menjelaskan bahwa adanya pusat informasi publik (PIP) cukup memenuhi informasi mengenai Kota Semarang. Ia beranggapan bahwa hadirnya PIP mampu mencukupi kebutuhannya terhadap internet, sehingga memudahkan dalam mencari informasi “memudahkan sih karena kan wifinya lancar, jadi cepet kalau nyari informasi apapun itu.” Ia juga menjelaskan bahwa PIP ini dapat memudahkan masyarakat yang tidak mengerti internet untuk datang mencari informasi “karena adanya PIP ini menurutku berperan sih mbak buat masyarakat yang gak ngerti pakai android gitu, jadi kan bisa dateng langsung kesini.”

Selain itu hal berbeda diungkapkan oleh informan<sup>71</sup>. Menurutnya adanya pusat informasi publik ini mampu meningkatkan pembangunan sumber daya manusia untuk lebih mengenal dan mencintai Kotanya. Ia menyatakan bahwa “...balaikota sering ngadain event kan, nah PIP ini sebagai media partner kan ada kayak iklan-iklan gitu jadi ya pasti masyarakat sedikit banyak tau, karena saya juga sering mengetahui informasi ya dari PIP ini kak.” Dengan demikian PIP mampu memberikan informasi mengenai event-event yang ada di Semarang sehingga dapat menarik warga Semarang untuk ikut terlibat didalamnya.

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Rabu 24 Mei 2017, di Gedung PIP

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP yaitu Asya, pada hari Senin 22 Mei 2017, di Gedung PIP

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap bahwa adanya PIP telah mencukupi informasi publik. Adanya pusat informasi publik merupakan suatu gebrakan baru ketika kita menyadari bahwa selama ini masyarakat biasa akan kebingungan ketika harus melakukan pengurusan terhadap data atau informasi terbuka di wilayah gedung pemerintahan. Setidaknya penulis sendiri yang pernah mengalami hal tersebut ketika kebingungan harus ke gedung mana, lantai berapa, mencari siapa saat melakukan pencarian data. Di PIP ini, publik dapat meminta data apa saja mengenai kota Semarang. Mulai dari struktur pemerintahan, sejarah, data organisasi di Semarang, data kemiskinan, data mengenai destinasi wisata di Kota Semarang, RKPD hingga APBD Kota Semarang. Namun kebanyakan data yang dimohonkan oleh masyarakat adalah keperluan penelitian oleh mahasiswa seperti informasi perihal program "Smart City" Pemkot Semarang, data SKPD Kota Semarang, database Perusahaan yang ada di kota Semarang, RKPD, data urban, dan SOTK.

#### **4.2.3 Pandangan Masyarakat mengenai Pusat Informasi Publik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik**

Hadirnya pusat informasi publik sebagai wujud inovasi Pemkot Semarang terhadap keterbukaan informasi publik, ditanggapi baik oleh masyarakat Semarang. Hal ini dapat terlihat dari data pengguna PIP yang setiap tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 pengguna PIP telah mencapai 444 orang, sedangkan pada tahun 2015 jumlah nya mulai meningkat

mencapai 29775 orang, dan pada tahun 2016 telah mencapai 48607 orang yang datang untuk memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian informan mengungkapkan bahwa dengan hadirnya pusat informasi ini telah memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang publik. Seperti yang diungkapkan oleh Gloria<sup>73</sup> yang menyatakan bahwa PIP “udah sih udah membantu, terutama kalau kayak aku internet kan kak kayak nyari tugas, tempatnya juga nyaman gitu sih.”

Hal ini dikarenakan pusat informasi publik memiliki tempat yang strategis, yaitu berada satu gedung dengan balaikota, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat Kota Semarang. Selain itu suasananya yang sejuk, tenang dan nyaman menjadi faktor penarik bagi masyarakat untuk terus menerus mengunjunginya. Terdapat pula layar monitor yang tersedia, sehingga dapat dimanfaatkan pengunjung untuk melakukan akses internet. Di bagian lain dalam ruangan itu juga ada beberapa komputer berjaringan internet dan wifi gratis didukung dengan kecepatannya serta terdapat majalah, koran, brosur informasi.

Sementara esensi PIP sebagai pusat informasi kurang mendapat perhatian bagi para penggunanya. Seperti yang diutarakan oleh Alip<sup>74</sup>, ia menyatakan bahwa hanya mengetahui PIP sebagai fasilitas public, namun tidak mengetahui sebagai fungsi utamanya yaitu pusat informasi apakah bisa meminta data atau tidak. Sebagian besar pengguna pusat informasi publik ini, tertarik untuk

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan customer service, pada hari Jumat 26 Mei 2017, di Gedung PIP

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Selasa 23 Mei 2017, di Gedung PIP

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Senin 29 Mei 2017, di Gedung PIP

mengunjungnya dikarenakan koneksi Internet cepat, tempatnya nyaman.<sup>75</sup> Dengan kelebihan itu lah banyak informan yang hanya memanfaatkan sebagian kecil fasilitas yang tersedia untuk mengerjakan tugas dari sekolah, mencari referensi, tutorial, rapat, nongkrong dan wifi an.

Berdasarkan hasil wawancara, hampir semua informan yang datang ke PIP belum sengaja datang untuk mencari informasi atau melihat informasi di web Kota Semarang. Seperti yang diutarakan oleh Asya<sup>76</sup> yang hanya sepintas melihat informasi di web Semarang, yaitu “kalau saya sih karena ini tugas ya kak, jadi ee masih belum bener-bener lebih tau lagi detail lagi, tapi cukuplah buat orang awam yang Cuma ingin tahu tentang Kota Semarang.”

Senada salah satu informan<sup>77</sup> ia juga kurang memperhatikan informasi-informasi yang telah tercantum di web Kota Semarang, berikut tuturnya “pernah liat tapi enggak memeperhatikan banget sih,jadi aku kurang tahu.” Sama hal nya dengan Puti<sup>78</sup> yang menyatakan “kalau buka aplikasi di komputer PIP pasti muncul web nya semarang, tapi ga pernah otak-atik, karena ga nyari jadi ya kurang tau informasinya.”

Hal ini menandakan bahwa memang sebagian besar informan belum merasa perlu mengetahui informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Rabu 24 Mei 2017, di Gedung PIP

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Rabu 24 Mei 2017, di Gedung PIP

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP yaitu Hima, pada hari Senin 29 Mei 2017, di Gedung PIP

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Sabtu 27 Mei 2017, di Gedung PIP

Kota Semarang. Berbeda dengan Dani yang hampir setiap hari mengunjungi PIP dan adanya kemauan untuk memperhatikan kemajuan Kota Semarang, ia menyatakan bahwa informasi yang ditampilkan cukup bagus. Akan tetapi, ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki seperti menu yang bila di klik tidak memberikan informasi apapun. Ia mengatakan “secara tampilan bagus tapi masih ada menu yang diklik gak ada aksi apa apa, bisa tampilan mobile segala ukuran layar, bisa di cek di website [semarangkota.go.id](http://semarangkota.go.id) di bagian informasi dan dokumentasi, menu yg di klik tidak memberikan info apapun.”<sup>79</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa faktor internal dan eksternal menjadi salah satu hal yang membentuk persepsi terhadap suatu objek. Faktor yang mempengaruhi persepsi berasal dari dalam diri individu seperti adanya perhatian, pengalaman, pendidikan, dan kebutuhan mengenai suatu objek. Dan, faktor eksternal dapat diketahui melalui kondisi situasional dan personal, karena mempunyai sifat-sifat yang menonjol, seperti gerakan, pergaulan dan intensitas stimuli. Karena inilah persepsi individu satu dengan yang lainnya berbeda. Sumber daya yang memadai merupakan salah satu kunci berhasilnya penerapan keterbukaan informasi. Pemanfaatan sumber daya dengan tepat akan membuat kebijakan tersebut semakin diminati oleh implementor. Komponen dari sumber daya meliputi;

1. Tersedianya informasi yang relevan: Informasi diperlukan bagi masyarakat untuk mengetahui tujuan atau arahan dari adanya suatu kebijakan.

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Rabu 24 Mei 2017, di Gedung PIP

Kenyataan dilapangan bahwa kekurangan informasi/pengetahuan mengenai pelaksanaan KIP memiliki konsekuensi langsung seperti masyarakat kurang mengetahui unsur yang terdapat dalam UU KIP secara jelas sehingga menimbulkan inefisien dalam melakukan pengawasan.

2. Keahlian para pelaksana: Seperti yang telah dijelaskan bahwa salah satu kendala yang dihadapi Pemkot Semarang adalah kurangnya pemahaman birokrasi akan keterbukaan informasi publik. Kurangnya pemahaman para pelaksana kebijakan karena adanya perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah dari klasik dan saat ini mengharuskan untuk dibuka secara umum. Tentunya bukan merupakan hal mudah untuk mengubah pola tersebut. Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan pemahaman dan kemampuan para pelaksana untuk melakukan kebijakan tersebut. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja para birokrat.
3. Adanya fasilitas yang memadai: Fasilitas pendukung yang dapat dipakai seperti sarana dan prasarana diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Fasilitas publik harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi untuk terwujudnya fasilitas yang memenuhi kebutuhan publik. Dari konsep tersebut bahwa peran sarana dan prasarana sangat penting. Menurut Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 Tahun 2010 mengenai standar pelayanan publik, mengharuskan PPID harus memenuhi sarana dan prasarana seperti, ruang pelayanan informasi, komputer, scanner, burner cd, dan alat-alat penunjang lain sesuai



kebutuhan badan Publik. Untuk memaksimalkan implementasi keterbukaan informasi publik, saat ini PPID Kota Semarang telah memenuhi sarana prasarana tersebut. Salah satunya telah terdapat meja PPID yang ditempatkan di gedung PIP sebagaimana diatur dalam UU. Tanpa adanya fasilitas, implementasi keterbukaan informasi publik tidak akan berjalan dengan baik.

#### **4.3 Aspek Konatif Penilaian Masyarakat mengenai KIP melalui adanya Pusat Informasi Publik**

Melalui aspek ini, peneliti ingin mengetahui penilaian masyarakat Kota Semarang terhadap adanya keterbukaan informasi publik melalui adanya gedung PIP dengan kriteria informasi dan perasaan yang mereka miliki. Di era globalisasi pemerintah dituntut untuk cepat tanggap dalam menghadapi perubahan diberbagai bidang. Salah satunya pemenuhan hak masyarakat akan informasi yang aktual, cepat dan mudah diakses semua kalangan. Keterbukaan informasi publik di Kota Semarang diwujudkan dengan menghadirkan gedung Pusat Informasi Publik. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas.

Oleh karena itu, keterbukaan informasi di dikemas dengan 3 in 1 pelayanan publik melalui gedung pusat informasi publik (PIP). Pelayanan publik yang baik akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintahan adalah milik masyarakat, yakni pemerintah yang mengalihkan wewenang kontrol yang dimilikinya kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat perlu diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan

pemerintah.<sup>80</sup> Secara teoritis untuk mencapai hal tersebut ada beberapa indikator, yaitu:

### 1. Transparansi

Transparansi adalah syarat utama terbentuknya pemerintahan yang baik dan demokratis. Hanya dengan inilah dapat menjamin bahwa penyelenggaraan pemerintahan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Dani menyatakan bahwa; “keterbukaan perlu agar pemerintah dapat menyimpulkan apa yang diinginkan oleh masyarakat sehingga bisa melaksanakan tugas sesuai kebutuhan masyarakat.” Senada diutarakan oleh Hagi menyatakan bahwa; “keterbukaan itu perlu agar pemerintah bersikap transparan dan sebagai fungsi masyarakat mengontrol pemerintahan.” Hingga saat ini, pelayanan bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak, mudah dimengerti dan disediakan secara memadai telah dilakukan oleh Pemkot Semarang. Salah satu hal yang telah dilakukan oleh Pemkot Semarang dengan menghadirkan Pusat Informasi Publik sebagai ruang publik yang mudah diakses semua kalangan.

### 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan bahwa setiap individu ataupun organisasi harus dapat mempertanggungjawabkan yang menjadi hak, wewenang dan kewajibannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seperti yang diungkapkan oleh

---

<sup>80</sup> Reformasi pelayanan publik hal 4

Thomas<sup>81</sup> bahwa akuntabilitas “Perlu, ya itu kan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat.” Ia juga berpendapat dengan hadirnya pusat informasi publik dapat dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan pertemuan seperti meeting dll karena tempatnya yang nyaman, jadi dapat mengurangi biaya yang aneh-aneh. Dari wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pejabat publik seharusnya dapat memanfaatkan fasilitas yang telah dibuat agar sesuai dengan tujuan dari adanya akuntabilitas yaitu; untuk mengontrol penggunaan kewenangan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, menjamin penggunaan sumber daya publik didasarkan pada kepentingan publik., dan untuk mendorong kinerja birokrasi menuju pemerintahan yang baik.<sup>82</sup>

### 3. Partisipatif

Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Perhatian pentingnya partisipasi menjadi salah satu kunci untuk menjalankan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik. Untuk itu masyarakat luas diharapkan dapat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hadirnya gedung PIP ini dianggap sebagian besar informan memiliki manfaat yang cukup memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang publik. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat kurang antusias dalam memaksimalkan keterbukaan informasi ini sebagai kontrol publik. Mereka cenderung acuh tak acuh untuk mengetahui segala hal yang telah dilakukan

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, Pada Selasa 30 Mei 2017, di Gedung PIP

<sup>82</sup> Eko Prasodjo. Buku Panduan Tentang Transparansi Dan Akuntabilitas Parlemen. Jakarta: UNDP.hal 12

pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh Puti<sup>83</sup> “mungkin lebih di share lagi mengenai PIP, biar banyak yang tau kalau ada Pusat informasi disini gitu, biar masyarakat makin antusias buat mencari informasi tentang Kota Semarang.”

Hal ini diperlukan karena adanya keterbukaan pemerintah bisa lebih merangkul warganya. Meningkatnya partisipasi dalam pemerintahan tergantung pada tingkat kesadaran individu masing-masing mengenai hak mereka sebagai masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Alip<sup>84</sup> “saya belum melihat partisipasi yang besar dari masyarakat akibat KIP, namun setidaknya masyarakat kota Semarang mulai berbenah untuk kemajuan kotanya. Meskipun belum terlalu berpengaruh namun KIP di kota Semarang bisa memberikan pemahaman kepada saya ataupun public lainnya untuk ikut serta berperan dalam pembangunan kota Semarang.”

Hingga saat ini, keterbukaan informasi publik di kota Semarang sudah dikatakan terbuka sehingga mempermudah masyarakat untuk mengakses dan mengontrol pemerintahan. Dibandingkan lima tahun lalu sebelum adanya KIP, Kota Semarang telah mengalami progres yang cukup baik. Untuk menata semua itu diperlukan proses dengan membenahi yang kurang saja.<sup>85</sup> Akan tetapi, kurangnya pengetahuan dan sosialisasi menjadi faktor penghambat yang menyebabkan kurang pedulinya masyarakat terhadap pemerintahan. Sebuah

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Sabtu 27 Mei 2017, di Gedung PIP

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Senin 29 Mei 2017, di Gedung PIP

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Mas Amri sebagai wakil ketua LSM Pattiro, pada tanggal 8 Maret, di Kantor Lsm Pattiro

implementasi kebijakan akan berjalan efektif bergantung pada sikap implementor. Terdapat tiga bentuk sikap para implementor terhadap kebijakan, yaitu adanya kesadaran pelaksana, adanya arahan untuk memberikan respon terhadap suatu kebijakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakannya secara tepat.

Berdasarkan hasil wawancara, hampir seluruh informan berpendapat bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hal yang baik. Alasan mengapa keterbukaan informasi publik dinilai baik yang *pertama*, dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat memudahkan masyarakat dalam mengetahui segala informasi mengenai apapun tanpa batas ruang dan waktu. Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa informan salah satunya Gloria. Ia berpendapat bahwa keterbukaan informasi publik merupakan informasi yang mudah diakses untuk umum.<sup>86</sup> Menurutnya keterbukaan informasi ini dibutuhkan untuk mengetahui info-info yang sedang *up to date* agar masyarakat tidak ketinggalan informasi. Apalagi dengan hadirnya pusat informasi publik, dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Semarang sudah transparan karena telah membuka ruang untuk publik dan hal ini dirasa makin mempermudah dalam mencari informasi.

*Kedua*, dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu informan yaitu Hagi. Ia menjelaskan bahwa informasi harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai alat untuk melakukan

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Selasa 23 Mei 2017

pengawasan, agar tidak timbul prasangka negatif dari masyarakat.<sup>87</sup> Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang KIP yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.<sup>88</sup>

*Ketiga*, dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bercirikan transparan, akuntabel dan partisipatif (*good governance*). Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Alip<sup>89</sup>, yaitu “...dengan adanya KIP mampu meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.”

Hal tersebut merupakan suatu hal yang baik karena dengan demikian masyarakat lebih aktif ikut andil dalam segala kegiatan pemerintahan. Sejalan dengan teori *good governance* menyatakan bahwa *Good governance* dipandang sebagai langkah modernisasi pemerintah menuju proses penyelenggaraan pemerintahan yang lebih stabil didasarkan pada profesionalisme kinerja aparat

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Jumat 26 Mei 2017, di Gedung PIP

<sup>88</sup> UU KIP No 14 Tahun 2008

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Senin 29 Mei 2017, di Gedung PIP

guna memenuhi kepentingan publik.<sup>90</sup> Melalui penjelasan tersebut, peran pemerintah sangat penting dalam mewujudkan transparansi kepada masyarakat.

#### **4.3.1 Penilaian Masyarakat mengenai adanya keterbukaan informasi publik sebagai wujud pemerintahan yang transparan**

Salah satu bentuk persepsi adalah melalui aspek konatif yaitu penilaian terhadap suatu obyek. Dalam penelitian ini objek yang dimaksud adalah adanya keterbukaan informasi publik melalui adanya pusat informasi publik. Keterbukaan informasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, bentuk stimulus yang diberikan kepada masyarakat beragam, mulai dari situs resmi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan mudah, adanya pusat informasi publik, dan promosi melalui sosial media seperti instagram dll.

Berdasarkan penjelasan dari salah satu informan Dani, menjelaskan bahwa menurutnya saat ini pemerintah Kota Semarang sudah dikatakan transparan karena menurutnya ia merasakan dengan adanya informasi publik di Kota Semarang masyarakat jadi mengetahui program-program pemerintah dalam waktu dekat dan juga informasi publik yang berdasarkan fakta. Berbeda dengan Hima<sup>91</sup> yang menyatakan bahwa saat ini Pemkot Semarang belum dikatakan transparan karena kurangnya kemauan untuk ikut andil dalam penyelenggaraan pemerintahan.

---

<sup>90</sup> Dwiyanto, Agus, ed. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University press

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Senin 29 Mei 2017, di Gedung PIP

Sementara menurut Gelar sebagai salah satu orang yang sering menggunakan PIP, ia berpendapat bahwa saat ini Pemkot Semarang lumayan transparan. Hal ini di karenakan pemerintah sudah menjabarkan berbagai proker nya diwebsite. Ia juga menceritakan bahwa pekerjaannya sebagai freelance yang menuntutnya untuk terus mengikuti berita mengenai Kota Semarang. Dengan adanya keterbukaan informasi ini mempermudahnya untuk mendapatkan berita yang nantinya menjadi bahan referensi untuk menulis. Menurutnya saat ini kinerja pemerintah Kota Semarang lambat laun mulai terlihat untuk publik. Namun, semua hal itu kembali lagi ke masyarakatnya bagaimana menyikapi hal tersebut dan dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Senada dengan informan<sup>92</sup> yang mengungkapkan “ya tergantung orang nya sih mbak, kalau menunjangnya pasti menunjang cuma kembali lagi ke individu itu memang memanfaatkan fasilitas ini atau tidak,karena niatnya kan beda-beda mbak”

Dari hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa persepsi seseorang dalam mempersepsikan suatu objek tergantung pada perhatian, minat, dan kebutuhan masing-masing individu. Selain menilai bahwa keterbukan informasi publik itu merupakan hal yang harus dipenuhi dalam pemerintahan, sebagian informan kurang mengetahui bahwa dengan adanya keterbukaan informasi ini dapat mengontrol kinerja pemerintah. Mereka yang datang ke PIP cenderung merasa belum perlu untuk ikut terlibat dalam proses pemerintahan dan merupakan orang-orang yang cuek dalam mengontrol kinerja pemerintah.

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP yaitu Arya, pada hari Jumat 26 Mei 2017, di Gedung PIP



#### **4.3.2 Penilaian Masyarakat mengenai pengaruh adanya keterbukaan informasi publik terhadap pembangunan Kota Semarang**

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya kebebasan informasi mempunyai pengaruh tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat dapat dengan bebas mengakses informasi dari berbagai segi sesuai dengan kebutuhannya. Keterbukaan informasi publik ini diciptakan agar mempermudah fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Sehingga kesempatan mendapat informasi itu menjadi sama dan dapat mengurangi kekeliruan informasi.

Saat ini, pemerintah Kota Semarang telah gencar melakukan keterbukaan informasi dengan aktif melalui sosial media. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian kalangan muda dalam pembangunan Kota Semarang. Sehingga adanya keterbukaan informasi publik memiliki pengaruh terhadap pembangunan di Kota Semarang. Bagi beberapa orang yang kurang peduli terhadap pembangunan kotanya merasa keterbukaan informasi kurang mempengaruhi kehidupannya. Seperti yang diutarakan oleh Hima<sup>93</sup> “biasa aja sih,soalnya kan aku ga terlalu ngikutin banget, kan aku hanya sekedar ingin tahu aja.”

Akan tetapi bagi beberapa orang yang memiliki kepedulian terhadap kotanya akan menaruh perhatian mengenai kinerja pemerintahan. Seperti yang diutarakan oleh Dani<sup>94</sup> ia menjelaskan bahwa keterbukaan informasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. “Yang saya tau, munculnya banyak taman ber-wifi

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Senin 29 Mei 2017, di Gedung PIP

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Rabu 24 Mei 2017, di Gedung PIP

diberbagai daerah di Kota Semarang adalah karena permintaan masyarakat terutama anak muda melalui sosial media, mereka menulis saran melalui twitter dan kemudian di gagas oleh pemerintah Kota Semarang.” Dengan adanya transparansi ini ia lebih antusias terhadap program pemerintah seperti pembuatan kartu BNI Tap Cash Semarang Hebat demi menyukseskan program Semarang Smartcity. Dalam hal ini menurutnya jika pemerintah merespon cepat keluhan dari masyarakat dalam hal ini bisa meningkatkan pembangunan di kota semarang.

Senada dengan dani, menurut Puti, ia beranggapan bahwa dengan melakukan perbaikan daerah-daerah kecil yang disulap menjadi destinasi wisata berarti pemerintah telah mampu menarik warganya untuk ikut berpartisipasi. Menurutnya keterbukaan informasi publik dilihat dari seberapa mampu pemerintah untuk melakukan perubahan dalam pembangunan kotanya. “Nah dari situ masyarakat bisa ikut berpartisipasi. Jadi tuh adanya keterbukaan mungkin masyarakat udah mulai mengenal kota semarang sih”

Pendapat lain yang berbeda diutarakan oleh Alip<sup>95</sup> yang menjelaskan bahwa sampai saat ini ia belum melihat partisipasi yang besar dari masyarakat akibat adanya keterbukaan informasi publik. Namun, ia juga menuturkan setidaknya saat ini masyarakat kota semarang mulai berbenah untuk kemajuan kotanya dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat kurang memperdulikan pemerintah, mereka hanya menginginkan hasil tanpa melakukan pengawasan. Senada dengan Arya, yaitu “ya sudah mulai

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Senin 29 Mei 2017, di Gedung PIP

meningkat tapi belum merata seluruh daerah masih ada yang tertinggal gitu, terus juga masyarakat kota semarang belum seluruhnya paham jadi ada yang tidak peduli gitu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, memang saat ini banyak sekali progres dari kota semarang, seperti adanya PIP ini yang ditujukan buat mencari informasi dan sebagai ruang publik. Jika akses tersebut dimaksimalkan dengan baik, tentunya akan memaksimalkan salah satu prinsip good governance yaitu partisipasi serta pengawasan publik. Dalam hal ini warga memiliki hak dan mempergunakannya untuk menyampaikan pendapat, bersuara dalam proses perumusan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak, dan terlibatnya warga dalam mengontrol kegiatan pemerintah. Akan tetapi ini semua tergantung pada individu masing-masing dalam memaksimalkan akses yang telah disediakan oleh pemerintah.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar informan sering mengunjungi pusat informasi publik ini, tetapi belum ada yang sengaja datang untuk mencari informasi mengenai Kota Semarang. Seperti yang diutarakan oleh Gelar, ia berpendapat bahwa Pemkot Semarang sudah dikatakan transparan karena telah membuka ruang bagi publik dan menjabarkan berbagai proker di website Kota Semarang. Persepsi ini muncul dikarenakan seringnya ia menggunakan komputer yang disediakan di PIP dan melihat tampilan website semarang, jadi mau tidak mau informasi apapun itu pasti dibaca.<sup>96</sup> Disisi lain masyarakat menilai bahwa

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Sabtu 27 Mei 2017, di Gedung PIP

keterbukaan informasi melalui PIP Pemkot Semarang belum dikatakan transparan, karena tidak hanya dengan menyediakan tempat seperti PIP saja mungkin dapat dengan menyebarkan informasi melalui perangkat kota atau desa sehingga semua warga Semarang menjadi mengerti dan tahu mengenai informasi Kota Semarang. Hal ini dikarenakan sampai saat ini PIP hanya dikenal sebagian masyarakat sebagai ruang publik dan tidak sebagai tempat untuk mencari informasi.<sup>97</sup>

#### **4.3.3 Penilaian Masyarakat mengenai dampak adanya keterbukaan informasi publik**

Setiap suatu perubahan selalu memiliki dampak, baik itu positif maupun negatif. Adanya keterbukaan informasi publik memang memiliki berbagai manfaat yang menguntungkan untuk masyarakat, salah satunya sebagai fungsi kontrol kinerja pemerintah dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya. Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan berpendapat bahwa adanya keterbukaan informasi publik dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah Kota Semarang, sedangkan dampak negatif dengan adanya informasi publik Pemkot Semarang harus mampu menjaga stabilitas Kota Semarang agar tidak disalagunakan.

Alip sebagai salah satu informan menyatakan bahwa menurutnya dampak negatif dari keterbukaan informasi publik belum ada. Sedangkan dampak positifnya meskipun belum terlalu berpengaruh, namun keterbukaan informasi publik di Kota Semarang dapat memberikan pemahaman kepadanya ataupun

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Selasa 23 Mei 2017, di Gedung PIP

publik untuk ikut serta berperan dalam pembangunan Kota Semarang. Seperti terlibatnya warga dalam setiap kegiatan pemerintah. Sedangkan menurut Puti, ia menginginkan keterbukaan informasi publik di Kota Semarang mungkin lebih di share lagi mengenai pusat informasi publik. Hal ini ditujukan agar banyak masyarakat yang mengetahui kalau ada Pusat informasi sehingga masyarakat makin antusias buat mencari informasi tentang Kota Semarang.

Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan UU KIP adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai UU KIP. hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui adanya UU tersebut. Selain itu sikap apatis terhadap pemerintahan juga merupakan kendala yang menyebabkan kurang tercapainya tujuan UU KIP ini. Seperti yang diutarakan oleh Gelar<sup>98</sup>, ia beranggapan bahwa “untuk keterbukaan informasi sih tidak hanya di PIP saja, tapi pemerintah dapat menambah tempat untuk lebih menjangkau masyarakat dalam pemenuhan informasi.” Senada dengan Arya yang menilai bahwa “keterbukaan informasi tetep dominan cuma lebih merata aja mbak dibangunnya tempat seperti PIP ini biar lebih menjangkau ke masyarakat.”

Dari hasil wawancara tersebut, hal ini menunjukkan meskipun saat ini pemerintah telah berupaya untuk menciptakan keterbukaan informasi sesuai UU yang berlaku tetapi apabila masyarakatnya kurang memahami makna dari undang-undang tersebut maka proses terlibatnya masyarakat dalam pengawasan publik tidak berjalan semestinya. Dengan keadaan yang seperti ini keterbukaan informasi

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna PIP, pada hari Sabtu 27 Mei 2017, di Gedung PIP

sulit berkembang pada lingkungan masyarakat yang non-demokratis. Tidak ada demokrasi tanpa adanya partisipasi rakyat, dan tidak akan ada partisipasi rakyat tanpa adanya transparansi.

#### **4.3.4 Hubungan demokrasi dengan adanya keterbukaan informasi publik**

Berkaitan dengan pentingnya demokrasi, isu yang paling penting bukan menyangkut besar kecilnya peran pemerintah terhadap masyarakat, tetapi kemampuan pemerintah untuk mereformasi dan beradaptasi dengan lingkungan baru (globalisasi). Demokrasi merupakan suatu konsep modern yang memiliki esensi yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat. Dapat diartikan bahwa rakyat sebagai sumber kedaulatan, penyelenggara dan pengawas terhadap pelaksana kedaulatan. Hubungan keterbukaan dan demokrasi menurut (Mikhail Gorbachev) dalam setiap pembaharuan demokratis menuntut partisipasi dari setiap warganya, baik dalam tahap perencanaan hingga pengawasan.<sup>99</sup>

Salah satu syarat agar partisipasi masyarakat menjadi efektif yaitu adanya kebebasan akses informasi, menyampaikan pendapat dan berorganiasi. Keterbukaan mensyaratkan kesediaan semua pihak menerima kenyataan adanya pluralitas (kemajemukan) termasuk hak berbeda pendapat. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu pemerintah harus merespons globalisasi secara struktural, dengan mengalihkan sistem sentralistik ke sistem desentralisasi yaitu, satu sistem

---

<sup>99</sup> Amal, ichlasul dan Armaid armawi. 1996. *Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta. Hal 32

pemerintahan yang tidak hanya menumpahkan wewenang dari atas ke bawah, tetapi juga ada proses transfer dari bawah ke atas.<sup>100</sup>

Jika melihat fenomena keterbukaan yang terjadi di kota Semarang ini, keterbukaan informasi tidak hanya diukur melalui website atau PIP, melainkan dapat juga dilihat dari tingkat pengaduan masyarakatnya. Hal ini menarik disoroti dengan melihat partisipasi masyarakat dalam pengaduan, karena jika tingkat pengaduan itu naik, berarti masyarakat telah memperhatikan kinerja pemerintah. Otomatis adanya keterbukaan seperti yang dilakukan Pemkot Semarang dengan mengenalkan atau melaporkan kinerjanya melalui media sosial, masyarakat tidak akan mengetahui apa saja yang dikerjakan. Karena adanya keterbukaan ini, masyarakat jadi tahu tentang kota Semarang, oleh karena itu mereka melakukan pengaduan untuk membenahi apa saja yang kurang dari pemerintah. Tingkat pengaduan yang meningkat dapat dijadikan dasar bahwa sebenarnya masyarakat mengartikan keterbukaan informasi dengan cara mengevaluasi kinerja pemerintah, bukan untuk mendapatkan informasi yang bersifat normatif saja. Seperti yang diutarakan oleh salah satu informan<sup>101</sup> mengatakan bahwa "keterbukaan di Semarang cukup baik karena banyaknya layanan pengaduan di kota Semarang itu yang menunjukkan keterbukaan informasi publik di Semarang cukup baik."

Keterbukaan dapat berjalan optimal dalam lingkungan yang demokratis yaitu dengan adanya pemimpin yang menghormati hak-hak partisipasi rakyatnya. Kemudian adanya lembaga perwakilan yang kuat untuk menyalurkan dan

---

<sup>100</sup> Sumaryadi, Nyoman. 2010. *Sosiologi pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. hal 110

<sup>101</sup> Hasil Wawancara dengan masyarakat pengguna PIP yaitu Hagi, Pada hari Sabtu 27 Mei 2017

mengawasi aspirasi masyarakat. Namun, proses keterbukaan ini masih terganjal dengan budaya pemerintahan yang buruk karena telah merajalela di kehidupan masyarakat. Praktik *bad governance* seperti contoh pungli dianggap hal yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan rasa untuk menghindari upaya dalam membangun *good governance*, dan menyebabkan meluasnya sikap apatis terhadap pemerintahan.

Rasa apatis terhadap pemerintah muncul dikarenakan rasa bosan masyarakat yang tidak melihat adanya perubahan sesuai yang dikehendakinya. Padahal jika partisipasi masyarakat dalam politik, ekonomi, sosial dan budaya tinggi maka dapat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Ada beberapa hal yang menimbulkan apatisisme didalam masyarakat yaitu adanya situasi, kondisi, dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Beberapa faktor yang menimbulkan apatisisme yaitu, 1) tingkat pendidikan merupakan kunci utama dalam perkembangan pola pikir di masyarakat. 2) Reformasi birokrasi, adanya semangat merevisi dan menerapkan sistem politik yang baik. 3) Media komunikasi yang independen berfungsi sebagai kontrol sosial, bebas dan mandiri

Untuk mengembangkan praktik *good governance* perlu adanya perubahan mindset dalam birokrasi maupun masyarakat. Dengan pemanfaatan kemajuan teknologi dan komunikasi yang baik dapat mempermudah masyarakat untuk mengkritisi struktur pemerintahan serta menyesuaikan dengan tantangan global dan mengembangkan pemerintahan yang lebih demokratis. Selain itu, manfaat adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini, pemerintah dapat



mengembangkan proses pemerintahan secara lebih sederhana secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan warganya.

Dengan demikian membangun sikap partisipatif di masyarakat sangatlah penting agar fungsi kontrol yang ada di tangan masyarakat dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga kegiatan politik bukan menjadi tempat bermain para elit politik, melainkan sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan warga negara dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Padahal jika pengawasan ini dimaksimalkan oleh masyarakat, maka akan tercipta pemerintahan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan jauh dari kepentingan politik, dan dapat menuju pemerintahan yang baik.

#### **4.4 Analisis Persepsi Masyarakat Pengguna PIP Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Kota Semarang**

Pemenuhan undang-undang keterbukaan informasi publik telah dilakukan Pemkot Semarang dengan cukup baik, melalui adanya PIP dan pemenuhan informasi publik sesuai dengan UU KIP. Keterbukaan informasi merupakan akses yang diberikan oleh pemerintah agar memudahkan masyarakat dalam mencari informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Melalui adanya regulasi Pemkot Semarang yang mengatur tentang adanya PPID mewajibkan seluruh badan publik untuk transparan kepada masyarakat. Meskipun kebijakan keterbukaan informasi publik telah ditetapkan sejak tahun 2012, akan tetapi belum memberikan gambaran yang cukup untuk masyarakat mengenai adanya keterbukaan informasi publik sebagai wujud transparansi yang dilakukan Pemkot Semarang.

Berdasarkan hal tersebut, ada tiga aspek sebagai indikator untuk menjelaskan suatu persepsi, yakni aspek kognitif, aspek afektif dan aspek konatif. Menurut hasil penelitian melalui aspek kognitif dapat diketahui bahwa sampai saat ini masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dan memahami adanya keterbukaan informasi publik. Faktor utama yang menyebabkan sebagian masyarakat kurang mengetahui manfaat dari adanya keterbukaan informasi publik, dikarenakan kurangnya publikasi yang maksimal mengenai hal tersebut. Respon yang kurang dari masyarakat mengakibatkan adanya keterbukaan belum berjalan optimal. Beberapa informasi mengenai profil badan publik, hasil pembangunan, kegiatan pemerintah menjadi hal yang kurang diminati oleh masyarakat. Mereka seakan tidak peduli dengan apa yang dilakukan pemerintah seolah hanya mengikuti alur yang telah dikerjakan dan menginginkan hasil seperti yang diharapkan. Adanya Pusat Informasi Publik pun dirasa belum mampu menjangkau masyarakat akan informasi publik. Sebagian masyarakat pengguna kurang mampu untuk memahami bahwa PIP ini merupakan bentuk keterbukaan informasi dari pemerintah. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian di lapangan bahwa sebagian besar informan mengatakan bahwa mereka tertarik untuk datang ke PIP dikarenakan fasilitas/ruang publik nya sangat memadai, tetapi tidak mengetahui bahwa di PIP ini terdapat 3 in 1 pelayanan publik seperti, layanan data, layanan informasi, dan layanan pengaduan.

Berkaitan dengan aspek afektif dapat dilihat bahwa adanya PIP disambut oleh sebagian masyarakat pengguna karena ketersediaan fasilitas publik yang memadai dan manfaatnya adalah masyarakat tidak perlu kemana-mana jika membutuhkan

ruang publik. Dengan adanya PIP memudahkan masyarakat Semarang untuk mencari informasi. Sebagian masyarakat pengguna PIP merasa senang dengan adanya ruang publik yang disediakan pemerintah kota Semarang secara gratis dengan fasilitas yang memadai, tetapi adanya hal tersebut belum mampu merangsang masyarakat yang datang ke PIP untuk melihat esensi dari upaya implementasi keterbukaan/ transparansi yang dilakukan oleh Pemkot Semarang dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Dampak dari adanya PIP dirasa belum menarik masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui aspek konatif dapat terlihat bahwa sebagian masyarakat pengguna PIP menunjukkan sikap yang kurang peduli terhadap perubahan yang telah dilakukan oleh Pemkot Semarang. Dari hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terbuka untuk publik, diperlukan dukungan kuat dari partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan publik. Dengan adanya pemahaman yang tepat mengenai keterbukaan informasi, maka akan berdampak pada meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik; meningkatnya tuntutan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik seperti transparansi, dan akuntabilitas, sehingga mau tidak mau akan berdampak dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan tuntutan partisipasi publik.